

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dapat disusun sebagai bagian dari upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu kewajiban Perangkat Daerah adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud Akuntabilitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan juga merupakan salah satu Indikator Pencapaian Kinerja pada Unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat gambaran pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Sasaran Kinerja yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja serta sebagai umpan balik dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Pekanbaru, 10 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, SE. M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19721115 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.1.1 Dasar Hukum 1

 1.1.2 Maksud Tujuan 2

 1.2 Struktur Organisasi 3

 1.3 Tugas dan Fungsi 8

 1.4 Aspek Strategis Organisasi 9

 1.5 Permasalahan Utama Organisasi (*Strategis Issued*) 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

 2.1 Rencana Strategis (Renstra) 13

 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

 3.1 CAPAIAN KINERJA 17

 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021..... 18

 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 24

 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target 28

 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan 31

 3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan 31

 3.1.6 Analisis Program/Kegiatan SubKegiatan Yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... 34

 3.2 REALISASI ANGGARAN..... 40

BAB IV PENUTUP 48

 4.1 Kesimpulan Umum..... 48

 4.2 Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang..... 48

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021.
- Piagam Penghargaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Riau yang telah Optimal menyelesaikan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 dan Tahun sebelumnya.
- Peringkat Menuju Infromatif.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 1.2	Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Golongan.....	7
Tabel 1.3	Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Fungsional..	8
Tabel 1.4	Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah.....	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	15
Tabel 3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021...	18
Tabel 3.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021...	23
Tabel 3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	25
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra BPKAD.....	28
Tabel 3.1.5	Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33
Tabel 3.1.6	Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	36
Tabel 3.2	Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	41

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	5
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas Penggunaan Anggaran. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Kinerja dipaparkan pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKAD Provinsi Riau.

1.1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan LkjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai salah satu alat ukur dan indikator untuk menentukan perencanaan kegiatan di Tahun mendatang.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

II. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan Program;
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
3. Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penerimaan Daerah;
2. Subbidang Belanja Daerah;
3. Subbidang Pengelola Kas Daerah.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
3. Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

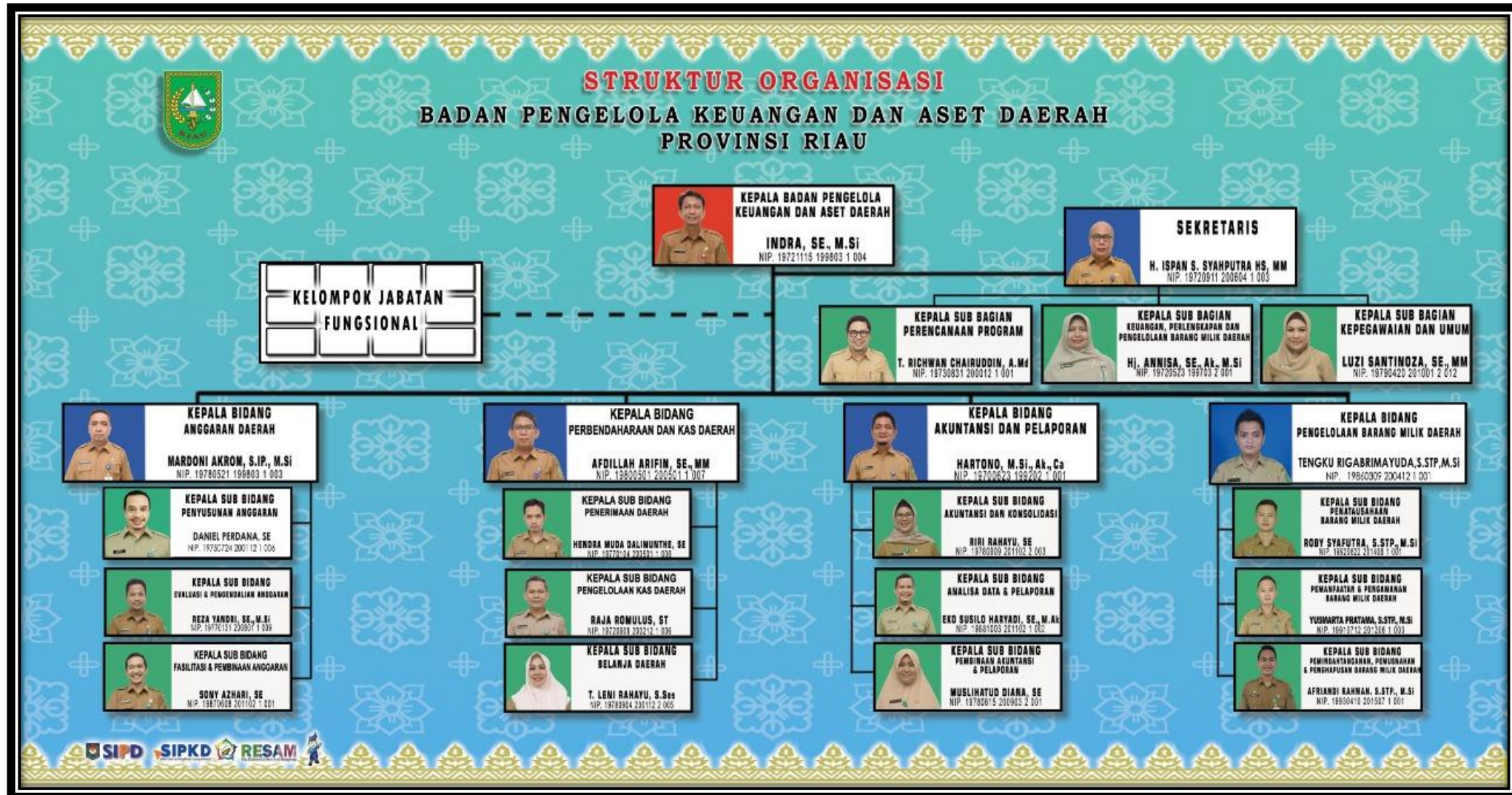
VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;

2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
3. Subbidang Pemindah Tanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 berjumlah 122 ASN, berikut komposisi ASN berdasarkan Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Struktural dan Fungsional :

Tabel 1.1
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan

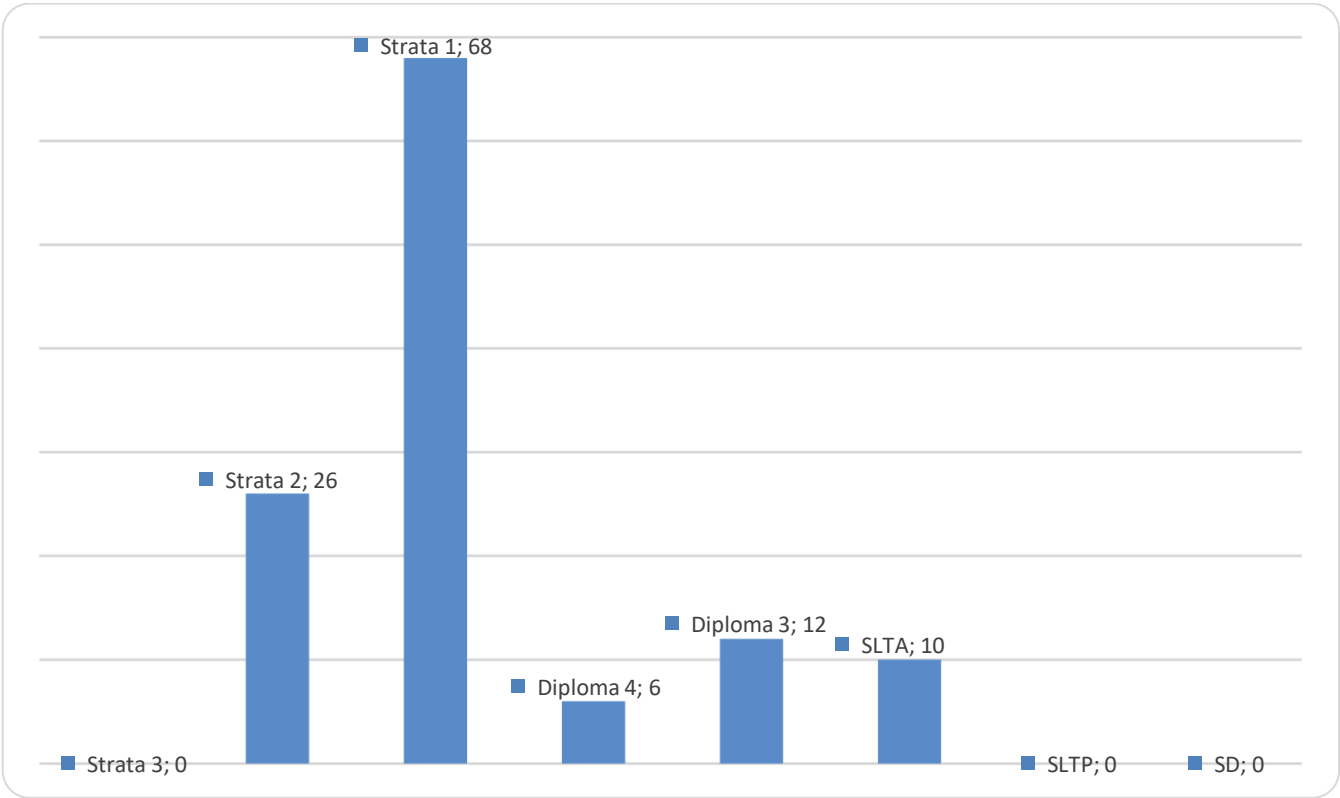
No	PENDIDIKAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Strata 3	0	0	0
2.	Strata 2	16	10	26
3.	Strata 1	31	37	68
4.	Diploma 4	5	1	6
5.	Diploma 3	4	8	12
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	6	4	10
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	0	0	0
8.	Sekolah Dasar	0	0	0
J U M L A H		62	60	122

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2021

Berdasarkan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terdapat 122 Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 62 orang laki-laki dan 60 orang perempuan, dengan pendidikan Strata 2 dengan Jumlah 26 Orang dan Strata 1 dengan Jumlah 68 Orang, Diploma 4 dengan jumlah 6 orang, Diploma 3 dengan jumlah 12 orang, Sekolah Lanjutan Tinggkat Atas dengan jumlah 10 orang, sedangkan untuk kondisi saat ini belum ada ASN yang berpendidikan Strata 3

ASN yang sudah berpendidikan tinggi/Sarjana berjumlah 112 Orang dengan Persentase 91,80 dan 10 Orang yang berpendidikan SLTA dengan Persentase 8,20. Sesuai data di atas dapat disimpulkan rata-rata ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah berpendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Aparatur BPKAD baik selaku OPD maupun selaku PPKD/BUD. Untuk melihat bagaimana perbandingan tingkat pendidikan ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat Gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan Kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2021

. Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini, Jumlah ASN yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 98 Orang, diikuti Golongan II dengan jumlah 11 Orang dan Golongan IV 13 Orang.

Tabel 1.2
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	9	4	13
2.	Golongan III	48	50	98
3.	Golongan II	5	6	11
4.	Golongan I	0	0	0
J U M L A H		62	60	122

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2021

Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Struktur pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Eselon

Tabel 1.3
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan
Jabatan Struktural Dan Fungsional

No	JABATAN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total (Orang)
1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1	-	1
2.	ADMINISTRATOR	5	-	5
3.	PENGAWAS	10	5	15
4.	FUNGSIONAL TERTENTU	4	2	6
J U M L A H		20	7	27

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2021

1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan mempunyai tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta sekaligus bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan fungsi dan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana disebutkan dalam butir 1.3 dapat dijelaskan bahwa fungsi tersebut merupakan penjabaran dari tugas BPKAD Provinsi Riau dalam membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya misi ke 5 (lima) Gubernur Riau yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi dan Informasi”, Misi ini di arahkan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi melalui penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel dengan di dorong sumber daya Aparatur yang Profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan aturan, sistem kerja yang jelas dan terukur, serta Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien untuk mencapai pelayanan prima.

Dalam menjalankan peran strategis sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penunjang terwujudnya sasaran kinerja Gubernur khususnya dalam pencapaian target penyerapan Anggaran, Akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah), serta pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi, BPKAD memiliki tanggung jawab untuk melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah, sehingga pengelola keuangan dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah, BPKAD memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas Pembinaan Pengelolaan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas dimaksud, dilaksanakan melalui evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Monitoring Pelaksanaan Anggaran, Pelayanan Konsultasi dan lain sebagainya.

1.5 Permasalahan Utama Organisasi (*Strategis Issued*)

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian Target Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari Permasalahan-Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal	Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;	Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal
		Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
		Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;	Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
		Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;	Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Belum seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan terimplementasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
		Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamankan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai. Pemanfaatan dan pengamanan BMD belum Optimal	Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-tunai
2	Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan Belum Optimal	Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia	Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana
		Belum adanya Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan BPKAD Provinsi Riau	Keterbatasan SDM yang memahami tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Sumber : Renstra 2019 – 2024

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.Permasalahan – permasalahan tersebut dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2024.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”**. yang bertujuan meningkatkan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang bersih, Transparan, dan Akuntabel dengan Sasaran:

- a) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
- b) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berupaya meminimalisasir tantangan – tantangan dan memaksimalkan peluang – peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah antara lain :

- a) Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- c) Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- d) Keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- e) Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.
- f) Penyederhanaan struktur organisasi beberapa jabatan structural disederhanakan menjadi jabatan fungsional tertentu, namun belum diiringi dengan persiapan payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat dimaksud selaku Kordinator/Subkordinator pada jabatan yang di ampu sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen jangka menengah 5 Tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis tersebut termuat didalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Rencana Strategis tersebut memuat Tujuan dan Sasaran Strategis beserta indikatornya yang menjadi acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis, Tujuannya yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Riau. Dan mempunyai 2 (Dua) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Riau, dan Meningkatkan kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk Indikator Kinerja tujuan telah ditetapkan yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)” Provinsi Riau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran dalam Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
Indikator Kinerja:
 - a) Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau
 - b) Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD
 - b) Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD

- c) Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau
- d) Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan
- e) Persentase SPM yang diterbitkan SP2D
- f) Rata-rata waktu pemrosesan SPM
- g) Rasio likuiditas Pemprov Riau
- h) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI
- i) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- j) Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu
- k) Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan
- l) Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses
- m) Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses
- n) Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi
- o) Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah.

2. Meningkatnya Kualitas Tata kelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota.

Indikator Kinerja:

- a) Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
- b) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD
- c) Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
- d) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan Tahun-Tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap Tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut antara lain :

- a. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima Amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang berisi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang diwujudkan pada Tahun 2021. Indikator kinerja tersebut telah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 865/XII/2014, dan Indikator lainnya yang relevan dengan sasaran Program yang akan dicapai.

Berikut ini Rincian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu
2	Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%
3	Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%
4	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu
5	Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%
7	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari
8	Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%
9	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu
10	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
11	Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%
12	Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	3 persil
13	Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	85%
14	Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses	12 Usulan
15	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	12,60%
16	Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%
17	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%
18	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%
19	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota
20	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%

Untuk mewujudkan Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau di dukung dengan Anggaran untuk pelaksanaan Program yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.458.534.037,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.944.496.928.156,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.305.953.213,00
TOTAL		1.977.261.415.406,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu Tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dan telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 serta perbandingannya dengan pencapaian Tahun sebelumnya.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sampai dengan akhir Tahun 2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang direncanakan (target) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisa ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa yang akan datang

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada bagian ini akan dijabarkan capaian Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Ada 2 sasaran yang Indikator tujuan BPKAD Provinsi Riau, Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 16 (Enam belas) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
2	Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	25,74%	129 %
3	Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	16,68 %	166 %
4	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu (31 Des)	Tepat Waktu (31 Des 2021)	100 %
5	Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	4 Dokumen Regulasi	200 %
6	Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%
7	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%
8	Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	105%	105%
9	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
10	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %
11	Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100 %
12	Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	3 persil	3 Persil	100 %

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
13	Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	85%	100%	117 %
14	Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses	12 Usulan	24 Usulan	200%
15	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	12,60%	11.33%	89.92 %
16	Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	100%	100%
Rata-rata capaian (%)				119.18%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas adalah 119,18%. Pencapaian rata-rata indikator kinerja termasuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 16 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam tabel 3.1.1 sesuai data capaian kinerja diatas terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang pencapaiannya kurang dari 100%. Yaitu disebabkan karena tidak tersedianya tenaga penilai Barang Milik Daerah (BMD) Appraisal dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan dimasa Pandemi Covid – 19, disamping itu terdapat Pencapaian Kinerja yang diatas 100 persen terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan. Rincian pencapaian dari 16 indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat 31 desember tahun sebelumnya.

2. Capaian Indikator Kinerja Anggaran Urusan Pendidikan yang terakomodir APBD terealisasi sebesar 129 %. Target Anggaran Pendidikan sebesar 20% terealisasi sebesar 25,74 %. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Belanja Daerah. Capaian ini sudah menunjukkan hasil yang baik, Jika dilihat dari target akhir periode Renstra telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 20%.
3. Capaian Indikator Kinerja Anggaran Urusan Kesehatan yang terakomodir APBD terealisasi sebesar 166 %. Target Anggaran Kesehatan 10% terealisasi sebesar 16,68 %. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan Anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji. Capaian ini lebih baik dari Tahun 2020 yaitu sebesar 15,40 %. Jika dilihat dari target akhir periode Renstra telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%.
4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Sebesar 100%,. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat akhir Desember (31 Desember). Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (3)
5. Jumlah Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun pada tahun anggaran 2021 sebanyak 4 Regulasi dari 2 Regulasi yang ditargetkan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 200%. Regulasi yang telah disusun adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Provinsi Riau.

- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
 - c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bansos yang Bersumber dari APBD.
 - d. Peraturan Gubernur Riau tentang Analisa Standar Belanja jika kita bandingkan dengan target akhir Periode Renstra sebanyak 10 Dokumen, sampai dengan Tahun 2021 telah menunjukkan Capaian sebanyak 15 dokumen dan sudah melebihi target kinerja pada Dokumen Renstra.
6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan SP2D adalah sebesar 100%. Sampai tanggal 31 Desember 2021 Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang di terima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan jumlah SP2D Yang di terbitkan yaitu berjumlah 12.142 SPM
 7. Capaian Indikator Kinerja Rata – rata waktu pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100%. Berdasarkan ketentuan Bab v Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Memproses SPM dengan Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling lama 2 (Dua) Hari sejak tanggal diterimanya SPM. Berkenaan Dengan waktu dua Hari tersebut diatas SPM dapat diproses apabila persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan telah terpenuhi. Berdasarkan dokumen penerbitan SP2D diketahui bahwa rata-rata waktu pemrosesan SP2D adalah 2 hari, sebagaimana target indicator kinerja yang di tetapkan.
 8. Capaian Indikator Kinerja Rasio Likuiditas Pemprov Riau adalah sebesar 105%, yaitu Jumlah Belanja Daerah yang dapat dibayarkan sampai tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.9.383.024.229.147,64 dibandingkan dengan Jumlah Belanja yang di ajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp. 8.931.723.986.040,55, sehingga Rasio Likuiditas mencapai 105%.
 9. Capaian Indikator Kinerja Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI adalah sesuai dengan target yang telah ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja yaitu tepat waktu dengan capaian 100%, LKPD disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau ke BPK-RI Perwakilan Riau pada Tanggal 3 Maret 2021 dan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa LKPD disampaikan 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir.

10. Capaian Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah 100 % yaitu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini sama dengan Tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan capaian target akhir periode Renstra.
11. Capaian Indikator Kinerja Persentase Entitas Akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu adalah sebesar 100 % dengan realisasi 33 OPD yang tepat waktu dari 38 OPD di Provinsi Riau. Capaian ini diukur dengan formulasi ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan OPD ke BPKAD.
12. Capaian Indikator Kinerja jumlah persil tanah Pemprov Riau yang disertifikatkan adalah 100%. Dari 3 Persil Tanah yang ditargetkan untuk disertifikatkan terealisasi sebanyak 3 Persil. Dengan rincian yang sudah disertifikatkan sebagai berikut :
 - a. Tanah SMA Negeri 1 Tualang, dengan alamat Jalan Sultan Alamuddinsyah Km. 07 Perawang Barat, Kabupaten Siak Provinsi Riau, Luas Tanah 13.700 m².
 - b. Tanah Kantor UPT. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Siak, dengan alamat Jalan Sultan Syarif Kasim Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Luas Tanah 687 m².
 - c. Tanah Rumah Dinas UPT. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Siak, dengan alamat Jalan Sultan Syarif Kasim Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Luas Tanah 495 m².Sesuai dengan target akhir periode Renstra jumlah persil tanah Pemerintah Provinsi Riau yang disertifikatkan sebanyak 12 persil, sampai akhir Tahun 2021 terealisasi sebanyak 8 persil. Artinya sampai akhir Tahun 2024 masih ditargetkan sebanyak 4 persil tanah lagi yang akan disertifikatkan.
13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses adalah sebesar 117%. Target Usulan Pemanfaatan Aset Tetap pada Tahun 2021 yaitu 85 % dari Usulan, sedangkan yang telah direalisasikan sampai dengan akhir Tahun 2021 juga sebanyak 100%.

- 14. Capaian Indikator Kinerja Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses adalah sebesar 200% dari 12 usulan yang ditargetkan terealisasi sebanyak 24 usulan.
- 15. Capaian Indikator Kinerja bangunan yang telah diinventarisasi Persentase aset tanah, gedung serta sebesar 89,92% dengan rincian yaitu dari 1.003 Aset Tanah dan 8.083 Gedung yang ada, terdapat 517 Aset Tanah dan 558 Aset Gedung yang sudah diinventarisasi.
- 16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah sebesar 100 % dengan realisasi 33 OPD yang mengusulkan RKBMD dari 33 OPD di Provinsi Riau. Capaian ini diukur dengan formulasi ketepatan waktu penyampaian RKBMD kepengelola Aset Provinsi Riau.

Indikator sasaran yang kedua adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.Pencapaian sasaran ini diukur dengan 4 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	100%	100 %
2	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,66%	100%
3	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	100%
4	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%
Rata-rata capaian (%)				100%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka Peningkatan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kab/Kota se-Provinsi Riau adalah 100 %. Pencapaian rata-rata indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori amat baik.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam table 3.1.2 dijelaskan bahwa seluruh indicator kinerja dapat tercapai diatas 100% yaitu :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen Ranperda Kabupaten/Kota sebesar 100 %. Capaian ini diperoleh dari 12 Dokumen Ranperda APBD Perubahan T.A 2021 Kabupaten/Kota dan 12 Dokumen Ranperda APBD T.A 2022 yang ditargetkan untuk dievaluasi, terdapat 11 Ranperda APBD Perubahan T.A 2021 Kabupaten/Kota yang sudah dievaluasi. dan 12 Ranperda APBD T.A 2021.
2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Perubahan T.A 2021 Kabupaten/Kota sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari realisasi sesuai dengan target yang atau 11 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi dari 12 Kab/Kota yang dievaluasi Ranperda APBD Perubahan T.A 2021.
3. Capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2020 Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebesar 100%. Dengan realisasi 12 Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2020 Kabupaten/Kota yang sudah dievaluasi selama Tahun 2021.
4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2020 Kabupaten/Kota sebesar 100% yaitu dengan realisasi 12 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Capaian kinerja pada Tahun 2020 dengan rata – rata sebesar 134,48% dari 20 Indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2020 ada 12 Indikator Kinerja capaiannya 100%, dan ada 5 Indikator Kinerja yang melebihi Target Kinerja 100% serta ada 3 Indikator Kinerja yang Capaiannya Kurang dari 100%. Sedangkan Capaian Kinerja 2021 adalah sebesar 118.87% ada 14 Indikator Kinerja yang Capaiannya 100% dan Indikator Kinerja yang melebihi 100% dan hanya 1 Indikator Kinerja yang capaian kurang dari 100%. Secara akumulasi Capaian Kinerja 2021 telah menunjukkan peningkatan dari 3

Indikator Kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2020 hanya tinggal 1 Indikator Kinerja yang tidak mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.3 berikut.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatn ya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	36,5%	182.5%	20%	25,74%	129 %
		Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	15,40 %	154%	10%	16,68 %	166 %
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %
		Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	9 Dokumen Regulasi	450%	2 Dokumen Regulasi	4 Dokumen Regulasi	200 %
		Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%	2 hari	2 hari	100%
		Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100 %
		Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
		Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	2 persil	5 Persil	250%	3 persil	3 Persil	100 %
		Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	80%	80%	100%	85%	100%	117 %
		Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses	10 Usulan	17 Usulan	170%	12 Usulan	24 Usulan	200%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisas	11,52%	11,33%	98,35%	12,60%	11.33%	89.92 %
		Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	97,30%	97,30%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	100%	83,33%	87,50%	100%	100%	100%
		Persentase Kabupaten/ Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,66%	100%	91,66%	100%	100%
		Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/ Kota	12 Ranperda Kab/ Kota	100%	12 Ranperda Kab/ Kota	12 Ranperda Kab/ Kota	100%
		Persentase Kabupaten/ Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PERSENTASE CAPAIAN			134.48%			118.87%		

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra.

Perbandingan Realisasi kinerja pada Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 rata - rata sudah tercapai. Dari 20 Indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2021, hanya satu Indikator Kinerja yang tidak tercapai yaitu Jumlah Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi, dan 19 Indikator lainnya sudah tercapai. Bahkan ada Indikator Kinerja yang melebihi target akhir kinerja Renstra yaitu Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, Jumlah usulan Pemanfaatan Aset dan Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.4 berikut :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra BPKAD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	25,74%	129 %
		Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	16,68 %	166 %
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %
		Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	4 Dokumen Regulasi	200 %
		Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%
		Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %
		Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100 %
		Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	3 persil	3 Persil	100 %
		Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	90%	100%	117 %
		Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses	15 Usulan	24 Usulan	200%
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	15,84%	11.33%	89.92 %
		Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	100%	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	100%	100%	100%
		Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab.Kota	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja diatas ada beberapa hal yang penyebab keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja yaitu :

- a. Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
- c. Adanya komitmen Bersama dalam mencapai Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah di tanda tangani

Adapun penyebab kegagalan atau penurunan dalam Pencapaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah adanya pembatasan aktifitas masyarakat atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimasa pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan terhambatnya beberapa Program Kegiatan di

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terkendala, terutama kegiatan yang sifatnya menyebabkan keramaian sehingga akan berpengaruh pada hasil Program Kegiatan yang akan dilakukan dan kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan tidak tatap muka atau secara virtual. Disamping itu sulitnya mengakses lokasi asset yang akan di inventarisasi di sejumlah Kabupaten/Kota di provinsi Riau.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap Sumber Daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian kinerja yang lebih baik.

Dari Tujuh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 telah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya dengan rata-rata tingkat efisiensi 34,02%. Ada dua kegiatan yang diatas rata-rata tingkat efisiensi, yaitu kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan tingkat efisiensi 46,26% dan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tingkat efisiensi 65,18%. Disamping itu ada lima kegiatan yang dibawah rata-rata tingkat efisiensi yaitu kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan tingkat efisiensi 17,84%, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan tingkat efisiensi 24,75%, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan tingkat efisiensi 25,65%, Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi 29.23% dan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi 29.23%. Realisasi Kinerja, Anggaran dan tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah sesuai dengan target Kinerja, mendekati tingkat efisiensi yang baik, untuk Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja rata-rata sudah mencapai 100%, Meskipun ada 1 Indikator Kinerja yang capaiannya kurang dari 100% yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi hanya mencapai 89,92%, hal ini disebabkan karna keterbatasan BPKAD dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas dan kegiatan pada situasi pandemic Covid-19.

Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.5 berikut :

Tabel 3.1.5
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				% Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi Anggaran	Program dan Kegiatan Tahun 2021	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	279.029.554	229,261,650	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	82,16%	17,84%
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	2.985.716.126	2.246.775.459	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	75,25%	24,75%
		Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM)	2 hari	2 hari	100%	640.668.330	344,298,050	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	53,74%	46,26%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%	709.961.795	527,870,804	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	74,35%	25,65%
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	12.6%	11,33%	89,92%	6.305.953.213	1.560.353.517	Pengelolaan Barang Milik Daerah	24,74%	65,18%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				% Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi Anggaran	Program dan Kegiatan Tahun 2021	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91.66%	91.66%	100%	465.660.380	329,547,009	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	70,77%	29.23%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	465.660.380	329,547,009	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	70,77%	29.23%
Persentase					98.56%				64.54%	34.02%

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan SubKegiatan Yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 rata-rata telah menunjukkan capaian 100% dan hanya satu Indikator Kinerja yang dibawah 100% yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi dengan tingkat capaian 89.92 %

Dari 26 SubKegiatan yang mendukung secara langsung diluar kegiatan rutin atau penunjang Indikator Kinerja ada tujuh SubKegiatan yang Realisasinya dibawah 50% yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, SubKegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan SubKegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini menunjukkan 19 Sub Kegiatan atau 73% Realisasi Anggarannya diatas 50%. Beberapa hal penyebab rendahnya realisasi tersebut adalah :

- a. Adanya Surat Edaran Kepala Daerah mengenai Larangan Mengadakan Kegiatan yang bersifat mengumpulkan Banyak orang untuk menghindari penyebaran virus Covid 19
- b. Adanya perubahan Regulasi terkait Permendagri 77 tahun 2020 dan Permendagri 64 Tahun 2013 sehingga penyusunan Peraturan Gubernur Riau tentang Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah belum bisa disahkan.
- c. Adanya perubahan regulasi terkait Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga Penyusunan Kebijakan Teknis mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan.
- d. Sulitnya menuju lokasi Barang Milik Daerah yang akan diinventarisasi Akibat Pandemi Covid 19 dan PPKM yang diberlakukan pada sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Uraian realisasi anggaran Subkegiatan yang menunjang indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1.6 berikut :

Tabel 3.1.6
Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	312.648.380,00	295.093.288,00	94.39
						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	279.029.554,00	229.261.650,00	82.16
						Penyusunan Standar Harga	292.016.000,00	256.284.200,00	87.76
		Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	25,74%	129 %	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.040.953.151,00	864.933.915,00	83.09
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	380.413.078.590,00	351.851.544.147,96	92.49
		Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	16,68 %	166 %	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	46.373.907.506,00	245.808.686,00	0.53
						Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	1.512.628.905.875,00	1.498.191.320.346,70	99.05

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.127.537.735,00	875.797.473,00	77.67
		Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	4 Dokumen Regulasi	200 %	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	504.576.860,00	210.950.783,00	41.81
		Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	168.788.760,00	111.218.250,00	65.89
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	379.693.135,00	162.831.950,00	42.89
		Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	105%	105%	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	92.186.435,00	70.247.850,00	76.20

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realiasasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	274.601.110,00	210.090.654,00	76.51
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	236.683.070,00	183.444.724,00	77.51
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	97.179.615,00	56.235.000,00	57.87
		Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100 %	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	101.498.000,00	78.100.426,00	76.95
		Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	3 persil	3 Persil	100 %	Pengamanan Barang Milik Daerah	4.743.629.524,00	657.529.686,00	13.86

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	85%	100%	117 %	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	73.803.645,00	8.605.000,00	11.66
		Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses	12 Usulan	24 Usulan	200%	Penilaian Barang Milik Daerah	345.926.200,00	150.014.250,00	43.37
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	46.727.760,00	35.768.950,00	76.55
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	12,60%	11.33%	89.92 %	Inventarisasi Barang Milik Daerah	288.657.500,00	182.462.431,00	63.21
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	86.799.406,00	78.838.000,00	90.83
		Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	100%	100%	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	158.982.190,00	75.615.800,00	47.56
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	171.753.978,00	51.689.800,00	30.10

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	97.657.010,00	63.545.400,00	65.07
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	100%	100 %	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	174,083,800,00	108,672,650,00	62.43
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,66%	100%	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	108,235,960,00	82,106,809,00	75.86
		Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	100%	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	84,623,000,00	68,574,550,00	81.04

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	98,717,620,00	70,193,000,00	71.10
Persentase					115.34%				64.32%

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pada tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau memperoleh Anggaran sebesar Rp. 1.977.261.415.406. Anggaran tersebut terdistribusi dalam (3) Program, (14) kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan yang dijalankan selama Tahun 2021. Jumlah realisasi anggaran adalah Rp. 1.880.388.555.563. Dari 44 Sub Kegiatan ada 1 Sub Kegiatan dengan realisasi tertinggi sebesar 100% yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Ada 10 Sub Kegiatan yang Realisasi diatasnya 90 persen, Ada 7 Sub Kegiatan Realisasinya dibawah 50 %, 26 Sub Kegiatan dengan Realisasinya diantara 50% sampai dengan 90 %.

Jika dilihat secara akumulasi menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap realisasi anggaran BPKAD Provinsi Riau pada Tahun 2021. Pada masa Pandemi *Covid-19* BPKAD terus menjalankan kegiatan walaupun kondisi sulit dan ada pembatasan - pembatasan terhadap kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Antisipasi yang dilakukan yaitu pemanfaatan media virtual seperti dalam pelaksanaan evaluasi APBD dan Rapat – rapat juga dilakukan secara virtual.

Hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran menunjukkan bahwa realisasi anggaran BPKAD Provinsi Riau tahun 2021 secara kumulatif adalah sebesar Rp. 1.880.388.555.563. atau 95,10% dari Pagu Anggaran. Penyerapan Anggaran paling optimal adalah pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sedangkan realisasi anggaran terendah berada pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak, Belum optimalnya penyerapan anggaran BPKAD Tahun 2021 disebabkan antara lain terhambatnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat pembatasan aktivitas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada triwulan II Tahun 2021.

Situasi pandemic Covid-19 yang belum menunjukkan trend pemulihan hingga semester I tahun 2021 mengharuskan pemerintah Provinsi Riau melakukan pergeseran anggaran guna memenuhi kebutuhan pendanaan untuk penanganan *Covid-19*, Hal tersebut secara langsung mempengaruhi tingkat capaian pelaksanaan anggaran pada semester I 2021, Bagaimana lebih jelasnya Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	Progres Keuangan		Realisasi Fisik
			Realisasi SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26,458,534,037.00	24,861,775,893.60	93.97	99.65
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,530,954,730.00	18,792,783,368.00	96.22	100.00
1	5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,530,954,730.00	18,792,783,368.00	96.22	100.00
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,010,612.00	6,826,860.00	35.91	90.14
2	5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,010,612.00	6,826,860.00	35.91	90.14
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,144,219,593.00	769,326,999.00	67.24	96.38
3	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	33,386,479.00	33,357,800.00	99.91	100.00
4	5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238,211,490.00	238,211,490.00	100.00	100.00
5	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105,554,000.00	59,218,000.00	56.10	100.00
6	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	353,377,624.00	236,009,680.00	66.79	100.00

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	Progres Keuangan		Realisasi Fisik
			Realisasi SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
7	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413,690,000.00	202,530,029.00	48.96	90.00
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	443,679,761.00	236,628,205.00	53.33	88.91
8	5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	443,679,761.00	236,628,205.00	53.33	88.91
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,500,677,453.00	4,274,083,921.00	94.97	100.00
9	5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,485,000.00	18,914,000.00	84.12	100.00
10	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	667,928,492.00	573,501,204.00	85.86	100.00
11	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,810,263,961.00	3,681,668,717.00	96.63	100.00
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819,991,888.00	782,126,540.60	95.38	100.00
12	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308,464,888.00	293,391,031.00	95.11	100.00
13	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74,910,000.00	73,798,000.00	98.52	100.00

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	Progres Keuangan		Realisasi Fisik
			Realisasi SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
14	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	436,617,000.00	414,937,509.60	95.03	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1,944,496,928,156.00	1,853,966,426,152.66	95.34	97.61
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,985,716,126.00	2,246,775,459.00	75.25	97.53
15	5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	312,648,380.00	295,093,288.00	94.39	100.00
16	5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,040,953,151.00	864,933,915.00	83.09	100.00
17	5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1,127,537,735.00	875,797,473.00	77.67	100.00
18	5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	504,576,860.00	210,950,783.00	41.81	85.38
II	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	465,660,380.00	329,547,009.00	70.77	100.00
19	5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	174,083,800.00	108,672,650.00	62.43	100.00

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	Progres Keuangan		Realisasi Fisik
			Realisasi SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				
20	5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	108,235,960.00	82,106,809.00	75.86	100.00
21	5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	84,623,000.00	68,574,550.00	81.04	100.00
22	5.02.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	98,717,620.00	70,193,000.00	71.10	100.00
III	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	640,668,330.00	344,298,050.00	53.74	84.76

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	Progres Keuangan		Realisasi Fisik
			Realisasi SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
23	5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	92,186,435.00	70,247,850.00	76.20	100.00
24	5.02.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	168,788,760.00	111,218,250.00	65.89	100.00
25	5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	379,693,135.00	162,831,950.00	42.89	74.28
IV	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	709,961,795.00	527,870,804.00	74.35	96.91
26	5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	236,683,070.00	183,444,724.00	77.51	100.00
27	5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	274,601,110.00	210,090,654.00	76.51	100.00
28	5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	97,179,615.00	56,235,000.00	57.87	77.40

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	Progres Keuangan		Realisasi Fisik
			Realisasi SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				
29	5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	101,498,000.00	78,100,426.00	76.95	100.00
V	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,939,415,891,971.00	1,850,288,673,180.66	95.40	97.61
30	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	380,413,078,590.00	351,851,544,147.96	92.49	99.97
31	5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	46,373,907,506.00	245,808,686.00	0.53	0.53
32	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	1,512,628,905,875.00	1,498,191,320,346.70	99.05	100.00
VI	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	279,029,554.00	229,261,650.00	82.16	100.00
33	5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	279,029,554.00	229,261,650.00	82.16	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6,305,953,213.00	1,560,353,517.00	24.74	28.16
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6,305,953,213.00	1,560,353,517.00	24.74	28.16
34	5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	292,016,000.00	256,284,200.00	87.76	90.55

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	Progres Keuangan		Realisasi Fisik
			Realisasi SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
35	5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	158,982,190.00	75,615,800.00	47.56	100.00
36	5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	171,753,978.00	51,689,800.00	30.10	34.39
37	5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	288,657,500.00	182,462,431.00	63.21	70.78
38	5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	4,743,629,524.00	657,529,686.00	13.86	14.55
39	5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	345,926,200.00	150,014,250.00	43.37	45.36
40	5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	73,803,645.00	8,605,000.00	11.66	17.99
41	5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, danPenghapusan Barang Milik Daerah	46,727,760.00	35,768,950.00	76.55	93.89
42	5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	86,799,406.00	78,838,000.00	90.83	100.00
43	5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	97,657,010.00	63,545,400.00	65.07	100.00
TOTAL		1,977,261,415,406.00	1,880,388,555,563.26	95.10	97.42

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selama kurun waktu Tahun 2021 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *Good Governance*.

Secara umum Capaian Kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 telah berhasil dengan baik dengan capaian kinerja diatas 100% dan Realisasi Anggaran sebesar 95,10%. Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
- c. Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;
- d. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain Suasana Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak bolehnya membuat kegiatan keramaian, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka tapi secara virtual.

Sebagai bentuk apresiasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Riau menerima Piagam Penghargaan dari Gubernur Riau pada Tahun 2019 dan 2020, yaitu “Terbaik Kedua” Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Riau yang telah Optimal Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau, dan pada Tahun 2020 BPKAD dapat

meningkatkan hasil kinerja Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat, dengan mendapatkan peringkat “Terbaik Kesatu” dalam penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau. Selanjutnya pada Tahun 2021 BPKAD juga mendapatkan Piagam Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai OPD dengan Peringkat Menuju Informatif (Kategori PPID Pembantu Provinsi Riau).

4.2 Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang adalah sebagai berikut :

Dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja BPKAD Provinsi Riau, dapat dirumuskan alternatif atau langkah-langkah strategis yaitu :

- a. Meningkatkan keselarasan pengusulan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempertajam perumusan sasaran dan tujuan yang berorientasi kepada hasil.
- b. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan dan melakukan efisiensi anggaran.
- c. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah serta Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.
- d. Penguatan aspek Regulasi/Peraturan melalui penyusunan peraturan pelaksanaan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Regulasi terbaru.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
- f. Meningkatkan kompetensi ASN/Non ASN dilingkungan BPKAD Provinsi Riau.



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU**
Jln. Cut Nyak Dien No.02, Pekanbaru
e-mail : plannerbpkad@gmail.com
[www. bpkad.riau.go.id](http://www.bpkad.riau.go.id)